

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya sebuah penyakit menular yang baru dan belum ditemukan obatnya yang dinamakan dengan COVID-19. Penyebaran yang cepat menyebabkan COVID-19 ini menjadi sebuah fenomena yang menakutkan, sehingga WHO (*World Health Organization*) mengumumkan bahwa penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ini berbahaya dan banyak negara-negara diminta untuk membatasi aktivitas karena virus ini menyebar dengan cepat.

Menurut Arfyanto dkk (2020), pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020 dan menyebar dengan cepat hingga mencapai puncak pada 17 Juli 2020 dengan jumlah 60.000 orang yang terinfeksi setiap harinya.

Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kebijakan tersebut termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Perekonomian juga menjadi berjalan lebih lambat atau *stagnan* karena ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik yang disebabkan oleh

terhambatnya faktor produksi, ketersediaan bahan baku, dan juga karena jalur distribusi yang dibatasi.

Berbagai pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah juga dapat berdampak terhadap aktivitas perdagangan antarwilayah, terlebih lagi Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 13.000 pulau. Sebagai negara yang unik yang terdiri dari atas banyak pulau, Indonesia mempunyai keragaman antardaerah yang disebabkan oleh perbedaan faktor ekonomi atau nonekonomi, seperti *local endowments* (sumber daya alam), geografis, etnis, dan budaya (Ridhwan, dkk, 2012).

Menurut Ruslam, dkk (2020) perdagangan antarwilayah menggambarkan rangkaian jalur perpindahan suatu barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Berdasarkan peraturan 29/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Perdagangan Antarpulau, Perdagangan Antarpulau adalah kegiatan perdagangan dan atau antarprovinsi yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan antarpulau dengan cara menyeberangkan barang dimaksud dengan menggunakan angkutan laut atau sungai. Dengan demikian, perdagangan antarwilayah dapat diartikan sebagai perdagangan dan pendistribusian barang dari satu provinsi ke provinsi lain yang berbeda dalam negara yang sama tersebut.

Perdagangan antarwilayah mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat. Hal ini karena ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap provinsi berbeda-beda serta berfluktuasi dan terdapat disparitas harga barang pokok antarwilayah. Perdagangan antarwilayah dari satu provinsi ke provinsi lain juga memiliki peranan penting dalam memacu perekonomian nasional. Selain itu, perdagangan antarwilayah dapat memperkuat pasar dalam negeri dari pengaruh negatif yang terjadi pada pasar global (Ruslam, dkk, 2020).

Dari hasil Survei Perdagangan Antarwilayah, total perdagangan antarwilayah di Indonesia tahun 2019, yakni sebelum COVID-19, adalah sebesar 1.628 triliun rupiah dengan total volume 2.537 juta ton (BPS, 2021). Komoditas yang paling banyak diperjualbelikan adalah dextrin, mobil, dan hasil tambang lainnya yang tidak

termasuk dalam lainnya (ytdl) seperti minyak mentah. Ketiga komoditas dominan tersebut memiliki pangsa sebesar 23 persen terhadap nilai total perdagangan antarwilayah. Dari 34 provinsi, 13 provinsi memiliki surplus neraca perdagangan antarwilayah dan 21 provinsi yang mengalami defisit neraca perdagangan antarwilayah. Surplus neraca perdagangan antarwilayah menunjukkan bahwa total nilai transaksi penjualan dari provinsi tersebut ke provinsi lainnya lebih besar dibandingkan total nilai transaksi pembelian provinsi tersebut dari provinsi lainnya, berlaku sebaliknya untuk defisit neraca perdagangan antarwilayah. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan surplus perdagangan antarwilayah terbesar di tahun 2019, diikuti oleh Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Sementara itu, Banten, Lampung, dan Bali merupakan tiga provinsi dengan nilai defisit neraca perdagangan antarwilayah terbesar.

Menurut data BPS (2021), perdagangan antarwilayah di Indonesia pada tahun 2020 (pada masa COVID-19) menghasilkan volume total 4.071 triliun kg yang naik dari tahun 2019 dan memiliki nilai total sebesar 1.196 triliun rupiah yang turun dari tahun sebelumnya. Adapun kelompok komoditas terbesar adalah benang kapas, minyak bumi, batu bara, bahan galian, dan mobil. Kelima komoditas ini mencakup 27,72% perdagangan antarwilayah di Indonesia. 10 provinsi mengalami surplus sedangkan 24 provinsi mengalami defisit neraca perdagangan antarwilayah. Jawa Barat menjadi provinsi dengan surplus tertinggi sedangkan Jawa Tengah mengalami defisit paling dalam.

Menurut studi yang dilakukan Siburian (2022) untuk melihat apakah terdapat korelasi antara diversitas ekonomi daerah tahun 2019 (sebelum adanya COVID-19) dan resiliensi ekonomi daerah tahun 2020 (pada saat COVID-19) di wilayah Aglomerasi Pulau Jawa. Data yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2010 pada level kabupaten/kota di enam wilayah Aglomerasi Pulau Jawa tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini menggunakan Indeks Herfindahl-Hirschman yang telah dinormalisasi (HHI*) dan indeks resistensi yang dianalisis dengan Korelasi Spearman. Berdasarkan perhitungan indeks diversifikasi,

wilayah dengan indeks yang didominasi kabupaten/kota yang paling terdiversifikasi adalah wilayah Aglomerasi Jogja Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Aglomerasi Kedung Sepur, Jogja Raya, dan Gerbang Kerto Susilo didominasi oleh kabupaten/kota yang resilien terhadap suatu guncangan seperti krisis akibat pandemi. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Korelasi Spearman, hasil menunjukkan pada wilayah Aglomerasi JABODETABEK semakin tinggi diversitas ekonomi sebelum adanya COVID-19 maka resistensi pada saat COVID-19 semakin tinggi.

Penelitian Fandan (2022) dilakukan untuk melihat perubahan tingkat diversifikasi ekonomi daerah di masa pandemi COVID-19 di wilayah-wilayah aglomerasi di Pulau Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2010 pada level kabupaten/kota di enam wilayah Aglomerasi Pulau Jawa tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini menggunakan indeks Herfindahl-Hirschman yang telah dinormalisasi (HHI*) dan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menggunakan indeks diversifikasi menunjukkan bahwa wilayah aglomerasi JABODETABEK dan Bandung Raya lebih didominasi oleh daerah yang ekonominya menjadi lebih terdiversifikasi. Sedangkan ekonomi di wilayah aglomerasi Solo Raya, Jogja Raya, dan Gerbang Kerto mayoritas menjadi lebih tidak terdiversifikasi. Sedangkan di wilayah aglomerasi Kedungsepur perubahan tingkat diversifikasi ekonomi daerah relatif seimbang. Hasil penelitian menggunakan Uji Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan bahwa pada wilayah aglomerasi JABODETABEK terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat diversifikasi tahun 2019 sebelum adanya COVID-19 dan tingkat diversifikasi tahun 2020 saat terjadinya COVID-19. Sedangkan wilayah aglomerasi Bandung Raya, Gerbang Kerto Susilo, Jogja Raya, Solo Raya dan Kedungsepur tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat diversifikasi tahun 2019 sebelum adanya COVID-19 dan tingkat diversifikasi tahun 2020 saat terjadinya COVID-19.

Bila COVID-19 membawa dampak terhadap perdagangan antarwilayah, besar kemungkinan bahwa pola atau struktur perdagangan antarwilayah dari masing-masing provinsi akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut misalnya dalam hal

jenis komoditas yang memiliki kontribusi terbesar, ataupun besarnya surplus/defisit yang terjadi. Pulau Jawa merupakan tempat untuk melakukan perdagangan dari berbagai daerah di Indonesia, hal ini menyebabkan Pulau Jawa menjadi salah satu pusat dari perdagangan antarwilayah. Dan juga pada saat pandemi COVID-19 melanda, Pulau Jawa mengalami tingkat penyebaran yang tinggi, menurut (Databoks, 2021), pada Minggu, 15 Agustus 2021, jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 384.807 kasus dan sebanyak 132.796 kasus atau 34,5% kasus aktif COVID-19 tertinggi berasal dari Pulau Jawa. Berdasarkan uraian demikian, penelitian dimaksudkan untuk melihat bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pola perdagangan antarwilayah di Pulau Jawa sebelum dan selama COVID-19.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah terdapat perbedaan pola perdagangan antarwilayah di Pulau Jawa sebelum dan selama COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pola perdagangan antarwilayah di Pulau Jawa sebelum dan selama COVID-19

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a) Pemerintah, sebagai bahan referensi dalam menentukan kebijakan untuk mengatur kebijakan perdagangan di masa krisis seperti pandemi saat ini.
- b) Masyarakat, sebagai bahan referensi dalam membeli ataupun menjual barang dan jasa pada masa krisis seperti pandemi saat ini.
- c) Peneliti/Pembaca, sebagai referensi atau bahan bacaan dalam penelitian lebih lanjut di kemudian hari.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Perdagangan antarwilayah dan Pandemi COVID-19

Bab ini membahas tentang landasan teori dan penelitian terdahulu untuk mendukung teori yang berkaitan dengan perdagangan antarwilayah serta hubungannya terhadap pandemi COVID-19

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang variabel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi analisis data dan hasil analisis data.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis data, keterbatasan hasil analisis data, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.